

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal urusan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam hal produktivitas dan kemampuan untuk mengembangkan diri. Saat ini permasalahan *Stunting*, penyakit kronis, pandemi COVID-19 dan sebagainya masih tinggi. Belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin serta belum meratanya kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu penyebab aspek kesehatan ini menjadi isu penting. Kepemudaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pemuda sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih baik sebelumnya harusnya bisa mendapatkan dorongan dalam meningkatkan kemampuannya. Saat ini partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan masih minim, hal ini disebabkan masih kurang optimalnya kegiatan fasilitasi untuk segala urusan.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh secara normal pada balita dikarenakan kekurangan asupan gizi kronis, yang mengakibatkan permasalahan pada tumbuh kembang. Pertumbuhan yang tidak wajar ini disebabkan tidak terpenuhinya gizi seimbang pada anak balita ketika masih dalam kandungan dan sejak dilahirkan. Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita *Stunting* di dunia berasal dari Asia (55%) sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita *Stunting* di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan (58,7%) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah (0,9%).² World Health Organisation (WHO)

menetapkan batas toleransi *Stunting* (anak bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah seluruh balita, sementara untuk kasus *Stunting* di Indonesia tercatat 35,6 persen (tahun 2017) dan menurun pada tahun 2018 sebesar 30,8 persen. Walaupun terjadi penurunan, faktanya kasus *Stunting* di Indonesia masih melebihi batas toleransi WHO.

Indonesia termasuk dalam lima negara dengan jumlah kasus *Stunting* tertinggi di dunia. Negara mengakui bahwa tingkat *Stunting* berada pada tingkat “krisis”. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk mengurangi *Stunting* pada anak-anak untuk memastikan bangsa tumbuh subur di abad ke-21. Dengan meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi semua anak bangsa, Indonesia meluncurkan strategi nasional baru tentang *Stunting* pada Bulan Agustus 2017, dimana akar penyebab *Stunting* bersifat kompleks dan multi-sektor dan membutuhkan upaya di semua tingkat pemerintahan. Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi *Stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *Stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja (*sumber: <https://globalnutritionreport.org/reports/2016-global-nutrition-report/>*).

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun), sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan.

Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak *Stunting*.

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, *Stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. *Stunting* disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam penanganan *Stunting*, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih". Seringkali masalah-masalah non kesehatan menjadi akar dari masalah *Stunting*, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Karena itu, penanganan *Stunting* membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *Stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2014) bahwa “*Stunting* pada masa kanak-kanak adalah salah satu yang paling signifikan hambatan bagi perkembangan manusia, secara global mempengaruhi sekitar 162 juta anak dibawah usia 5 tahun. *Stunting* dapat diartikan sebagai tinggi yang lebih dari dua standar deviasi di bawah kesehatan Dunia”, selain itu memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang¹, yakni:

1. Efek jangka pendek:

- a. Peningkatan kejadian kematian yang meluas;
- b. Peningkatan mental, geakan, dan verbal pada anak-anak tidak ideal ;dan
- c. Meningkatnya pembiayaan.

2. Efek jangka panjang:

- a. Tinggi badan yang tidak ideal sebagai orang dewasa (lebih pendek pada umumnya);
- b. Peningkatan risiko berat badan dan berbagai penyakit;
- c. Menurunnya kesejahteraan regeneratif;
- d. Batas dan pelaksanaan belajar yang tidak ideal selama tahun-tahun sekolah; dan
- e. Efisiensi dan batas kerja yang tidak ideal.

Di luar sektor kesehatan *Stunting* dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi

¹ *World Health Organization*. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief* (No. WHO/NMH/NHD/14.3). *World Health Organization*.

yang berakibat pada kerugian ekonomi, baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro, dalam hal ini berpengaruh kepada meningkatnya anggaran belanja kesehatan nasional. Sehingga, dalam upaya percepatan perbaikan gizi dan penurunan *Stunting* sangat dibutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha/mitra pembangunan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan secara menyeluruh diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa depan yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing.

Sasaran/Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14%. Status gizi sangat erat dengan permasalahan *Stunting* di Indonesia, tingginya angka *Stunting* tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak pada tingkat pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi. Hal ini disebabkan *Stunting* bukan saja gagal tumbuh kembang secara fisik, akan tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak (cognitive). *Stunting* permasalahan gizi yang sedang dihadapi Indonesia. Berkaitan hal tersebut dengan itu, pada masa jabatan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan Nawa Cita ke-5, *Stunting* dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dengan RPJMN 2020-

2024, dimana tahun 2024 target prevalensi *Stunting* harus diturunkan sebesar sebesar 14%.²

Penanganan *Stunting* sangat penting dilakukan melalui intervensi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pelaksanaan Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada balita priode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang menyumbang penurunan *Stunting* sebesar 30%. Intervensi ini menysasar masyarakat secara umum. Kegiatan intervensi dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya diperoleh dalam waktu relatif pendek. Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif ialah kegiatan yang dilaksanakan diluar sektor kesehatan yang menyumbang penurunan *Stunting* sebesar 70% .

Menerapkan intervensi terpadu untuk mengurangi stunting adalah tanggung jawab bersama semua sektor, bukan hanya satu instansi. Untuk itu, diperlukan tim lintas disiplin untuk menerapkan langkah-langkah integrasi. Anggota tim multidisiplin harus mencakup setidaknya kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, industri, masalah sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/penciptaan lapangan kerja/perumahan dan permukiman, dan pemberdayaan. otoritas termasuk. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, status sipil dan keluarga berencana, pengendalian obat dan makan.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan guna memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat. Penurunan kasus *Stunting* harus melibatkan kolaborasi antara sektor kesehatan dan sektor non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Penanganan *Stunting* perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi *Stunting* sehingga penurunannya dapat terjadi secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Tanggal 5 April 2018 dilaksanakan rapat terbatas yang membahas tentang penanganan *Stunting*, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan para pimpinan K/L untuk menangani permasalahan *Stunting* secara terintegrasi.

Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk penanganan *Stunting* pada tanggal 12 Juli 2017. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penanganan *Stunting* penting dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral melalui pengintegrasian program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pada tanggal 9 Agustus 2017, kembali dilaksanakan rakor tingkat menteri yang menyepakati Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Lima Pilar, yaitu:

- 1) Komitmen dan visi kepemimpinan;
- 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
- 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa;
- 4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi,

Dalam hal ini pemerintah juga menetapkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan penanganan *Stunting* dan menetapkan wilayah prioritas dan strategi percepatan penanganan *Stunting*, dan menyiapkan strategi kampanye nasional *Stunting*.

Lima pilar penangan *Stunting* di atas dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive oleh lintas sektor terkait. Dalam pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian yang baik, pengorganisasian menjadi salah satu unsur yang penting untuk mengarahkan intervensi penanganan *Stunting* terintegrasi dapat diimplementasikan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta review hasil pelaksanaan. Dipandang perlu adanya pembagaaian tugas dan tanggung jawab menjadi penting baik antar pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintahan tingkat desa.

Dalam rangka implementasi program penanganan *Stunting* telah disepakati pula 8 (delapan) rencana aksi konvergensi yang meliputi sebagai berikut:

1. Analisis situasi program penurunan *Stunting*.
2. Penyusunan rencana kegiatan.
3. Rembuk *Stunting*.
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa.

5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia.
6. Sistem Manajemen Data *Stunting*.
7. Pengukuran dan publikasi data *Stunting*.
8. Reviu kinerja tahunan.

Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan angka prevalensi *stunting* menurun di tingkat nasional yaitu sebesar 6,4% 5 tahun terakhir, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Untuk balita status normal terjadi pulapeningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018).³

Hasil penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019 yang terintegrasi Susenas Maret 2019 menunjukkan prevalensi *underweight* didapatkan sebesar 16,29 persen (15,94%-16,65%), *Stunting* 27,67 persen (27,22%-28,11%), dan *wasting* 7,44 persen (7,19%-7,71%).⁴

Program percepatan dan penurunan kasus prevalensi *Stunting* di dalam Strategi Nasional diusulkan adanya peningkatan skala program di 100 kabupaten/kota tahun 2018; 160 kabupaten/kota pada 2019; 390 kabupaten / kota pada tahun 2020 dan mencapai penuh cakupan dengan semua 514 Kabupaten dan Kota pada tahun 2021. Strategi tersebut mendukung tujuan yang disepakati secara internasional dari World Health Assembly (WHA), the Sustainable Development Goals (SDGs) dan the Scaling Up Nutrition (SUN) target pada tahun 2025 untuk memangkas jumlah anak *Stunting* di bawah umur lima tahun sebanyak 40%,

³ Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018) <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-ri-set-kesehatan-dasar-riskesdas/>

⁴ Hasil penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI). (2019) <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/event8-02.pdf>

penurunan jumlah *wasting* kurang dari 5%, turunkan jumlah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan memastikan tidak ada peningkatan jumlah anak balita yang kegemukan. Serta mendukung penurunan kasus wanita usia 15-49 tahun yang terdampak kekurangan sel darah merah sebesar 50% serta menaikkan persentasi ibu-ibu yang memberikan air susu ibu secara eksklusif minimal 50 persen.

Berbagai program-program penanganan *Stunting* telah dilaksanakan, akan tetapi belum berjalan efisien dan belum terlaksana dalam skala yang memadai. Kajian *World Bank* dan Kementerian Kesehatan mengidentifikasi bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar, sementara itu tumbuh kembang anak ketergantungan terhadap akses intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 HPK. Terdapat 28,7% baduta yang memiliki tempat akses layanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Dapat tersebut disimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangatlah penting dilakukan untuk penanganan *Stunting* dan masalah gizi.

Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020⁵, dijadikan sebagai dasar bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

⁵ Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020

dan desa dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* yang di 260 kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pemilihan kabupaten/kota dan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi didasarkan pada:

- a. Kabupaten/kota dengan kriteria jumlah balita *Stunting*;
- b. Kabupaten/kota dengan kriteria prevalensi balita *Stunting*; dan
- c. Kabupaten/kota dengan kriteria praktik baik.

Berdasarkan surta keputusan dimaksud Kabupaten Bandung ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus penanganan *Stunting* terintegrasi, maka dari itu diperlukan peran pemerintah daerah dalam bentuk strategi maupun kebijakan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* di kabupaten bandung. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting* dan membentuk Tim percepatan penurunan *Stunting* melalui Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan *Stunting* yang menjadi panduan dalam pelaksanaan intervensi penanganan *stunting* secara terintegrasi.

Kabupaten Bandung merupakan kabupaten tertinggi ke-4 se provinsi Jawa Barat dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 27,1% (Studi Kasus Gizi Balita Indonesia Tahun 2019). Prevalensi *Stunting* kabupaten Bandung masih tergolong tinggi dan masi diatas target RPJMN ditahun 2024 yaitu sebesar 14 persen. *Stunting* yang terjadi di Kabupaten Bandung tidak hanya disebabkan oleh ibu hamil maupun

anak balita. Meskipun status gizi ibu hamil dan balita sudah baik, penanganan *Stunting* masih perlu dilakukan melalui perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan akses sanitasi dan air bersih.

Persentase Balita Stunting pada anak baduta (dibawah dua tahun) tahun 2019 sekitar 7,32% mencapai kategori sangat baik walaupun ditargetkan 7% masih terdapat kesenjangan sekitar 0,32% namun untuk prevalensi Stunting harus berada dibawah target karena menunjukkan angka kejadian Stunting sekitar 19.133 balita Stunting dari 261.419 seluruh balita yang ditimbang jika dibandingkan dengan tahun 2018 persentase balita Stunting mengalami penurunan sekitar 1,998 balita tercegah dari Stunting (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019).

Terdapat beberapa solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menurunkan prevalensi balita *Stunting* diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan pembinaan petugas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan pengetahuan ibu balita dan kader melalui Pos Gizi dan Kegiatan Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
3. Pemberian Vitamin A bagi balita, Fe pada Remaja Putri Sekolah, PMT Ibu Hamil dan PMT Balita
4. Koordinasi Lintas sektor dan Lintas program upaya penanganan da intervensi *Stunting*, Surveilans Gizi RS, Inovasi Posyandu Remaja
5. Rencana operasional yang berfokus pada promotif dan preventif yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) *Stunting* Kabupaten Bandung.

Penanganan *Stunting* sangatlah penting untuk segera aksi agar permasalahan negatif dalam hal penghambatan perkembangan anak. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental sehingga tingkat pengetahuan anak tidak ideal, membahayakan efisiensi yang berkurang di masa dewasa, membuat anak lebih rentan terhadap penyakit dan menyebabkan anak-anak berada pada pertaruhan yang lebih tinggi mengalami penyakit konstan di masa dewasa mereka, padahal, hambatan dan berbagai jenis masalah ini dinilai menambah kekurangan 2-3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) setiap tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Kebijakan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tema **"Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Bandung Tahun 2021"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu: Pertama, masih perlunya komitmen bersama terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan; Kedua masih perlunya adanya dukungan pengembangan kapasitas pada kabupaten prioritas terhadap percepatan penanganan *Stunting* dalam peningkatan cakupan layanan intervensi gizi; Ketiga, masih tingginya angka *Stunting* di Kabupaten Bandung berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018 dan SSGBI tahun 2019; Keempat dan masih belum optimalnya penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada tingkat pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kebijakan penanganan *stunting* yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana implementasi program penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung?
3. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi program penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung?

D. Maksud Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data dan mengetahui bagaimana bentuk kebijakan penanganan *stunting* yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung?
2. Untuk memperoleh data dan mengetahui bagaimana implementasi program penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung?
3. Untuk memperoleh data dan mengetahui faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam upaya penurunan *stunting* Kabupaten Bandung?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan positif khususnya yang berhubungan dengan penanganan *Stunting* serta pelaksanaan pelayanan publik yang baik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah untuk studi lebih lanjut dalam

mengimplementasikan kebijakan penanganan *stunting* guna untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14% di Tahun 2024 dengan Pelibatan Lintas Sektor.

